

IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG

Yola Adikara Permata¹, Dwiki Adi Putra², Isabella³, Amaliatulvalidain⁴

^{1,2,3,4)} Fakultas Ilmu pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri

Email:202061004@student.uigm.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how government policy is implemented in supporting Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Palembang and In this thesis the researcher uses qualitative methods by observing and being directly involved in the phenomena that are occurring and making innovations in social situations, then the data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that by using the Van Meter and Van Horn theory to carry out the analysis there are five (5) indicators, namely (1) Policy Measures and Objectives, the efforts made by the Palembang City Cooperative & UMKM Department to help the SME group are in the form of providing programs. , socialization and BIMTEK so that the SME community in the city of Palembang progresses and develops and issues in the form of goods or funds are supported by the center or government, (2) Resources, this agency provides final resources in collaboration with the BPR (People's Credit Bank) of Palembang City limited according to the rules, namely a maximum of three million without collateral, while other banks can have a maximum of two hundred and fifty million without collateral. (3) Implementation of Activities and Communication Between Organizations, (4) Characteristics of Implementing Agents, the main characteristic of an effective part in supporting SMEs is helping to develop, progress and succeed Palembang City SMEs by holding exhibitions in Palembang City and outside Palembang City, (5) Economic, Social and Political Environment, that politics has nothing to do with the Palembang city cooperative & SME department which is more involved in government and (6) Attitude/Tendency (Disposition) of the Implementers, that SPAP is a capital loan but from the bank just asking for data . And the department acts as an intermediary or bridge for UKM and the department. It can be concluded that the Implementation of Government Policy in Supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang City has gone quite well and shows that the Palembang City Cooperatives & MSMEs Department has made various efforts to support the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). in its territory. Through implementing policies that focus on training, outreach and collaboration with the private sector and other agencies, they are trying to strengthen the SME ecosystem. Despite facing challenges such as lack of resources and financial limitations, this agency continues to strive to improve performance and support the growth of SMEs in Palembang City. With three (3) suggestions, namely (1) Strengthening Training and Mentoring, (2) Strengthening Financing Access, and (3) Forming Partnerships with the Private Sector.

Keyword: UMKM, Policy Implementation, City Government

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang dan Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam fenomena yang sedang terjadi dan melakukan inovasi dalam situasi sosial, kemudian metode

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melakukan analisis terdapat lima (5) indikator, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang untuk membantu kelompok UMKM berupa pemberian program sosialisasi dan BIMTEK agar masyarakat UKM di Kota Palembang maju dan berkembang dan masalah dalam bentuk barang atau dana di dukung oleh pusat atau pemerintah, (2) Sumber Daya, dinas ini memberikan sumber daya akhir yang bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Palembang dibatasi sesuai aturan yaitu maksimal tiga juta tanpa agunan, sedangkan bank lain maksimal dua ratus lima puluh juta tanpa agunan. (3) Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik utama bagian yang efektif dalam mendukung UKM adalah membantu mengembangkan, memajukan dan mensukseskan UKM Kota Palembang dengan mengadakan pameran-pameran di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, bahwa politik tidak ada kaitannya dengan dinas koperasi & UKM Kota Palembang yang lebih banyak terlibat dalam pemerintahan dan (6) Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, bahwa SPAP merupakan pinjaman modal tetapi dari pihak bank hanya meminta data saja. Dan dinas berperan sebagai perantara atau jembatan bagi UKM dan dinas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada pelatihan, penjangkauan, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya, mereka berusaha memperkuat ekosistem UMKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan keuangan, dinas ini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang. Dengan tiga (3) saran, yaitu (1) Memperkuat Pelatihan dan Pendampingan, (2) Memperkuat Akses Pembiayaan, dan (3) Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta.

Kata kunci: *UMKM, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Kota*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saat ini ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dan tantangan seiring dengan dinamika global. Pada umumnya, Indonesia memiliki sektor ekonomi yang beragam, melibatkan industri-industri seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan investasi menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja ekonomi negara ini. Upaya untuk meningkatkan daya saing, memperkuat sektor UMKM, dan

mendukung inovasi terus menjadi fokus dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Cahyono dkk. 2023).

Ekonomi Indonesia juga terus mengalami dinamika yang signifikan seiring berbagai faktor seperti perubahan kondisi global, kebijakan pemerintah, dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat krisis Kesehatan global, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021. Pemerintah fokus pada reformasi struktural, peningkatan daya saing, dan diversifikasi

ekonomi untuk memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sektor ekonomi Indonesia yang beragam, dari pertanian hingga manufaktur dan jasa, memainkan peran penting dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kinerja makroekonomi, termasuk inflasi dan tingkat suku bunga, juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan teknologi dan kebijakan pro-inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci dalam Upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks global yang terus berubah, kemampuan adaptasi dan ketangguhan ekonomi Indonesia menjadi faktor kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam menghadapi masa depan (Purwadinata dan Batilmurik t.t.). Sumber daya manusia (SDM), modal,

bahan baku, pemasaran, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi/informasi merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi. Meskipun IMK mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,65 juta orang di tahun 2020. Tetapi kualitas SDM

IMK masih relatif rendah. Hal tersebut tercermin dari besarnya persentase (54,52%) pengusaha dan tenaga kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, sehingga wacana IMK “naik kelas” tertunda oleh sejumlah permasalahan (Siswoyo, 2021: 3-4).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kota Palembang, semakin berkembang pesat dengan adanya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung distribusi pendapatan (Janianda dkk. 2024).

Pemerintah Indonesia telah dengan gigih melaksanakan berbagai program dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mencerminkan komitmen kuat terhadap sektor ini. Inisiatif-inisiatif tersebut melibatkan pemberian bantuan insentif dan pembiayaan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga secara aktif terlibat dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memasarkan produk-produk lokal UMKM. Sementara itu, upaya digitalisasi pemasaran UMKM turut di implementasikan, menciptakan akses yang lebih luas ke pasar Global. Pandemi

Covid-19 telah berdampak yang mendalam dan merata terhadap perekonomian, menciptakan tantangan yang kompleks dan tak terduga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan ekonomi yang tajam terjadi seiring dengan implementasi langkah-langkah pembatasan sosial, *lockdown* ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penutupan bisnis yang diterapkan untuk meredam penyebaran virus Covid-19. Sektor-sektor inti seperti industri, perdagangan, dan jasa mengalami kontraksi yang signifikan, seiring dengan terhentinya aktivitas ekonomi akibat kebijakan kesehatan masyarakat. Pengaruhnya yang meluas terlihat dari berkurangnya daya beli masyarakat, penurunan investasi, dan dampak serius pada lapangan pekerjaan. Bisnis kecil dan menengah, yang sering kali menjadi inti dari ekonomi lokal, juga terpukul keras oleh situasi ini. Selain itu, ketidakpastian global dan gangguan pada rantai pasokan internasional turut menyulitkan upaya pemulihan ekonomi.

Pemerintah Indonesia merespons krisis ini dengan mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi, program bantuan sosial, dan langkah-langkah lainnya untuk menjaga stabilitas dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, perjalanan pemulihan ekonomi tetap dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk varian baru virus

dan dinamika ketidakpastian global. Menghadapi kompleksitas situasi ini, penting untuk terus memantau perkembangan, merancang kebijakan yang responsif, dan memastikan kerjasama yang erat antara sektor publik dan sektor swasta. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan upaya bersama, adaptabilitas, dan kebijakan yang cerdas untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang seiring dengan evolusi pandemi COVID-19

Tidak hanya itu, Pemerintah memperkuat potensi wirausaha melalui Alumni Program Kartu Prakerja dengan menyediakan pembiayaan tambahan melalui KUR. Semua langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk meningkatkan daya saing UMKM. Lebih jauh lagi, Pemerintah telah menetapkan UU Cipta Kerja sebagai landasan strategis untuk menaikkan kelas UMKM dalam jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan industri kecil maupun menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM), terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan perorangan dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang- Undang tersebut.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara mandiri. Tidak termasuk dalam usaha ini cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Undang-Undang tersebut juga menetapkan standar untuk usaha kecil.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh

individu atau badan usaha. Usaha ini tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Menengah mencakup baik usaha kecil maupun besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. (UMKM 4.0. n.d,2020:27).

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada tiga kriteria dalam UMKM terbagi:

Tabel 1.1 Kriteria dalam UMKM

N0	Kriteria Usaha	Omzet Usaha
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp2 Milyar
2	Usaha Kecil	Rp2 Milyar – Rp15 Milyar
3	Usaha Menengah	Rp15 Milyar – Rp50 Milyar

Sumber : PP No. 7 Tahun, 2021

Berdasarkan **Tabel 1.1** yang ditetapkan oleh PP No. 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah peneliti dapat mengkaji bahwa Usaha Mikro mempunyai Omzet Usaha dengan Maksimal RP. 2 Milyar (dua Milyar rupiah), Usaha Kecil dengan Rp. 2 Milyar – Rp. 15 Milyar (dua miliar rupiah – lima belas miliar rupiah) dan Usaha Menengah dengan Rp. 15 Milyar – Rp. 50 Milyar (lima belas miliar rupiah).

Kriteria UMKM sesuaikan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

1. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 3. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Menengah, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kota Palembang, sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Selatan, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Pada era globalisasi dan teknologi informasi seperti saat ini, UMKM di Kota Palembang dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Transformasi digital, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan global mendorong UMKM untuk terus beradaptasi agar tetap hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penelitian

tentang UMKM di Kota Palembang menjadi sangat relevan dan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Salah satu pusat perkembangan ekonomi di Pulau Sumatra bagian Selatan ialah Kota Palembang, memainkan peran penting dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Dinamika Dinas Koperasi dan UMKM. Sejak mengambil alih peran yang strategis, Dinas ini telah menjadi tulang punggung bagi pengembangan UMKM di kota tersebut. Melalui berbagai program inovatif, Dinas Koperasi dan UMKM Palembang telah berhasil memberikan dorongan positif bagi pelaku usaha kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Salah satu inisiatif yang mencolok adalah penerapan program pembiayaan yang mendukung UMKM, termasuk skema kredit yang terjangkau dan aksesibilitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, para pengusaha kecil di Palembang dapat mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan produksi, diversifikasi produk, dan memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Palembang aktif mengorganisir pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan para pelaku usaha. Salah satu fokus dalam pemasaran UMKM adalah digitalisasi, yang membantu mereka menghadapi era globalisasi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional

Pemerintah kota ini juga berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, Palembang terus berusaha menjadi tempat yang ramah bagi inovasi dan perkembangan usaha kecil, berkontribusi secara signifikan pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Bersumber pada yang sudah dijelaskan tersebut peneliti membuat rumusan masalah adalah :

Bagaimana implementasi dari PP No. 7 Tahun 2021 dalam mendukung Usaha Kecil di Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti guna mendukung pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memajukan sektor Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.

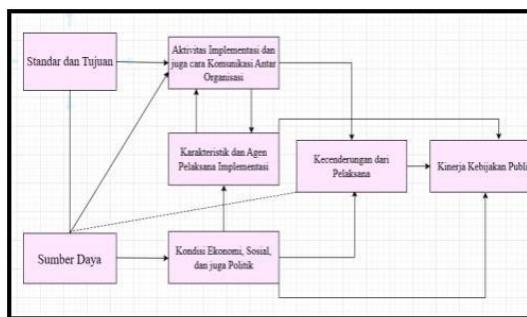
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan harapan dapat memberikan wawasan strategis bagi masyarakat UMKM dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal.

B. LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Teori Van Meter dan Van Horn dalam buku “Model-model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan” yang dikutip oleh Reno Affrian (2023), menyatakan bahwa Implementasi merupakan sebuah mengembangkan pendekatan yang disebut dengan *Model of the policy implementation* atau bahasa Indonesia menjadi Model pendekatan *top-down* diproseskan. Implementasi dipandang sebagai suatu abstraksi dari sebuah implementasi kebijakan dengan tujuan agar mencapai kinerja Implementasi kebijakan publik tinggi dan variabel. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan bagi Koperasi dan UMKM agar mereka dapat lebih berkembang, bersaing, dan berkontribusi pada perekonomian

Indonesia. Dengan PP No. 7 tahun 2021 ini pemerintahan memberikan kemudahan dalam koperasi dan UMKM, melindungi bagi koperasi dan UMKM, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, bimbingan teknis, serta penyediaan akses pembiayaan dengan kemudahan pemakaian skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemerintahan mendorong modernisasi koperasi agar bersaing di era digital.



Gambar 1.1 Model Analisis Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Sumber: *Van Meter and Van Horn*

Model implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn, pendekatan *top- down* yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut Model Proses Implementasi Kebijakan. Proses implementasi merupakan hasil langkah nyata dari penerapan suatu kebijakan yang sengaja dijalankan untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Proses ini juga bersifat berkelanjutan dan mempertimbangkan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki arah linier terhadap

penerapan keputusan kebijakan, serta pada kebijakan dan tindakan publik yang ada. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan tersebut (Sasuwuk, Lengkong, and Palar 2021),

Standar dan Tujuan Kebijakan

Jika standar kebijakan atau tujuan kebijakan ruang lingkup dan tujuan kebijakan benar-benar realistik secara sosial-budaya pada tingkat implementasi kebijakan, efektivitas implementasi kebijakan dapat diukur dengan keberhasilan, di tingkat warga negara. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk meningkatkan kebijakan ke tingkat yang dianggap berhasil, jika standar atau ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas.

Sumber Daya

Keberhasilan proses penegakan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memobilisasi sumber daya yang tersedia. Faktor terpenting bagi keberhasilan proses implementasi adalah peran laki-laki. Pada berbagai tahapan dalam proses implementasi, sumber daya manusia yang ada harus memenuhi kebutuhan kerja yang dibutuhkan oleh mandat (kewenangan) non-politik. Tetapi, jika sumber daya ini kekurangan keahlian dan kapasitas, sangat sulit untuk

mengharapkan kebijakan nasional menjadi efektif. Namun selain sumber daya lain yang perlu diperhatikan yaitu dana dan waktu. Karena suka atau tidak suka, ketika ada pegawai yang berkualitas dan kompeten, meskipun ada kekurangan uang melalui anggaran, sangat sulit untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh kebijakan publik. Sama dengan sumber waktu. Jika sumber daya manusia aktif dan pengeluaran terus berjalan, tetapi waktu hampir habis, ini juga bisa menjadi bagian dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sarana mencari dan yang dimaksud Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sarana tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi adalah metode yang efektif pada praktik kebijakan publik. Komunikasi juga berperan penting menjadi pondasi utama untuk menjembatani informasi antar pihak ke pihak lainnya dan juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pihak tersebut. Koordinasi yang baik memungkinkan penyelarasan antara berbagai kebijakan sektor, sehingga pesan yang disampaikan oleh pihak bersifat konsisten dan terkoordinasi. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pihak untuk mendengar

umpulan balik dari pihak lain, menciptakan siklus umpan balik yang konstruktif dan memperkuat hubungan antar pihak. Oleh karena itu, upaya bersama dalam mengkoordinasikan kebijakan publik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang transparan, inklusif, dan mendukung komunikasi yang baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Ketertarikan manajemen difokuskan pada organisasi resmi dan tidak resmi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya yang sesuai dan cocok bagi lembaga pelaksana. Misalnya, jika tujuan kebijakan pemerintah adalah mengubah perilaku diterapkan masyarakat atau perilaku yang bersifat radikal, promotor proyek harus bercirikan memiliki aturan hukum dan sanksi yang kuat. Pada saat yang bersamaan, jika suatu kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mengubah perilaku dasar masyarakat, lembaga eksekutif mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan begitu giat dan pembentukannya tidak sesuai dengan citra aslinya. Ruang lingkup dan bidang implementasi kebijakan juga harus dipertimbangkan ketika memilih lembaga pelaksana. Semakin luas cakupan

implementasi kebijakan, semakin banyak pemangku kepentingan yang turut terbawa.

1. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menilai efektivitas implementasi publik. Pada sudut pandang Van Metter dan Van Horn adalah ruang lingkup Kawasan luar (*eksternal*). Yang terlibat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang diberlakukan (Tachjan, 2006).

2. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan aparat penegak (*agent*) sangat memengaruhi keberhasilan penegakan ketertiban umum. Ini mungkin karena kebijakan yang diterapkan bukan hasil dari anggota masyarakat setempat yang benar-benar memahami permasalahan dan persoalan yang mereka alami. Namun, implementasi dari atas *top-down* (*bottom-up*) dari kebijakan ini memungkinkan politisi untuk mengatasi kebutuhan, keinginan atau masalah warga negara yang diinginkan, tidak pernah tahu (bahkan tidak bisa menyentuh).

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi di berbagai

negara karena peranannya yang krusial dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian dan sosial negara terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. UMKM berfungsi sebagai sumber utama penyerapan tenaga kerja di sektor informal, di mana banyak individu dan keluarga mengandalkan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks pemerataan pendapatan, terutama di daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang, di mana peluang kerja formal sering kali terbatas.

Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor ini. Kebijakan ini meliputi penyediaan akses yang lebih baik ke pembiayaan melalui kredit mikro, pelatihan keterampilan manajerial, serta program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melibatkan pengurangan hambatan regulasi, pemberian insentif pajak, dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk

mendukung operasional UMKM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan, berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. pasar, usaha kecil umumnya menggunakan teknologi sederhana dan melayani pasar lokal dengan jangkauan yang terbatas. Fokus inovasinya cenderung incremental, bukan disruptif, menyesuaikan dengan kapasitas bisnis. Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk merumuskan definisi konsep yang tepat, sehingga batasan operasional usaha kecil dapat diukur dengan jelas dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

Usaha kecil memiliki peran krusial dalam penelitian ekonomi, terutama dalam memahami terminologi dan karakteristik khusus yang menggambarkan sektor ini. Dalam penelitian, usaha kecil diidentifikasi sebagai entitas bisnis dengan skala terbatas baik dari segi modal, sumber daya, maupun tenaga kerja. Skala ini biasanya mencakup bisnis yang dikelola langsung oleh pemilik, dengan modal yang sering kali berasal dari sumber pribadi atau lembaga keuangan mikro. Jumlah tenaga kerja yang terbatas mencerminkan kapasitas operasional dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha

menengah atau besar. Aspek pengelolaan yang sederhana dan informal juga menjadi ciri khas usaha kecil, di mana keputusan bisnis sering kali diambil secara langsung oleh pemilik. Dari sisi teknologi dan pasar, usaha kecil umumnya menggunakan teknologi sederhana dan melayani pasar lokal dengan jangkauan yang terbatas. Fokus inovasinya cenderung incremental, bukan disruptif, menyesuaikan dengan kapasitas bisnis. Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk merumuskan definisi konsep yang tepat, sehingga batasan operasional usaha kecil dapat diukur dengan jelas dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

C. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode kualitatif dengan data pendekatan deskriptif. Artinya, dengan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti bukan berupa analisis dalam bentuk angka statistik numerik melainkan data-data tersebut berasal dari proses wawancara, catatan lapangan, dan arsipan dokumen resmi lainnya. Seperti yang dikutip oleh (Attride-Stirling 2016), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguraikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan hipotesis

masyarakat secara individu dan kelompok. Penjelasan ganda digunakan untuk mengidentifikasi prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif, memungkinkan peneliti memunculkan pertanyaan dari data dan memberikan ruang untuk interpretasi. Data dikumpulkan yang dilakukan melalui observasi yang cermat, termasuk deskripsi kontekstual secara rinci, disertai catatan wawancara mendalam dan analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mempunyai dua tujuan utama. Pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and to explore*), dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti membahas tentang inti segala penelitian yang mana dari hasil wawancara narasumber diatas adalah Secara keseluruhan, dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan UKM di wilayahnya. Meskipun menghadapi tantangan seperti kekurangan sumber daya dan keterbatasan finansial, mereka tetap berupaya untuk memberikan dukungan maksimal kepada UKM melalui pelatihan, sosialisasi,

pameran, dan kolaborasi dengan pihak swasta serta instansi lain. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ekosistem UKM di Kota Palembang, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal koordinasi dan pengelolaan sumber daya.

Palembang Expo 2024

Dinas Koperasi & UMKM kota Palembang mengadakan sebuah pameran UMKM yaitu “Palembang Expo 2024” yang berlokasi di Benteng Kuto Besak (BKB) pada tanggal 27-30 Juni 2024, resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali kota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta pada tanggal (27/06/2024) kegiatan ini dalam rangka memeriahkan HUT kota Palembang ke 1341, Pemerintah Kota (PemKot) memberikan untuk ruang besak bagi pelaku melalui Dinas Koperasi & UMKM kota Palembang agar memasarkan produk- produk UMKM.



Gambar 1.3 pembukaan pameran Palembang Expo 2024

Sumber: Observasi, 27 Juni 2024

Dengan dihadirkan langsung Kepala Dinas Koperasi & UKM koata Palembang yaitu Sulhijawati, Sekretaris Daerah kota Palembang yaitu Ratu Dewa, dan juga Pj. Walikota Palembang yaitu Ucok Abdulrauf Damenta lalu Penjabat Bupati Botan, Walikota Serang dan kegiatan ini diikuti 25 BUMN BUMD, 18 Kecamatan, dan juga sejumlah pemerintahan Kabupaten/ Kota seperti OKUT, Kabupaten Sarolangun, Serang Bnaten, Malang, dan ada juga dari kota Palembang yang ikuti dengan membawa masing-masing karya kerajinan dan kuliner khas masing-masing.



Gambar 1.4 Pj. Walikota Palembang & Kepdis Koperasi & UKM kota Palembang (*Sumber: observasi, 27 Juni 2024*)

Bawa Palembang Ekspo 2024 ini yang menjadi perhatian serta daya tarik wisata baik lokal dan luar bertujuan untuk

memperluas serta membangkitkan perekonomian kota Palembang. Selain itu, pameran atau event Palembang Expo 2024 ini cerminan dari berberapa ragam macam industri dan membawa potensi baik ekonomi dan membuka peluang lebih kuat lagi. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari dengan beberapa hiburan seperti musik tradisional melayu palembang, 4 band performance, talkshow dan beberapa hiburan lainnya. Di hari pertama, ada Opening Ceremony, Talkshow: BPMPTSP Oku Timur, Corporate Talkshow: BPR kota Palembang, dan Talkshow: Kabupaten Oku. Hari ke-dua, Open Booth Palembang, Corporate Talkshow: BPR kota Palembang, dan Corpporate lainnya. Hari ke-tiga, ada Open Booth Palembang Expo 2024, Corporate Talkshow: BPR kota Palembang, Coswalk Competition, Cosform Talkshow dan Dul Muluk. Dan di hari ke-empat dimana hari terakhir ialah Kpop Dance Competition, Coprorate Talkshow: BPR kota Palembang. Dan Closing Ceremoray Palembang Expo 2024.

E. KESIMPULAN

Pada hasil penjelasan bab sebelumnya dapat disimpulkan yang telah dilakukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang menunjukkan bahwa

Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui implementasi kebijakan yang terfokus pada pelatihan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pihak swasta serta instansi lain, mereka berusaha memperkuat ekosistem UKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kekurangan sumber daya dan keterbatasan finansial, dinas ini terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang, menyarakan:

1. Penguatan Pelatihan dan Pendampingan: UMKM perlu mendapatkan akses lebih besar terhadap program pelatihan dan pendampingan yang berkualitas, termasuk pelatihan manajerial, pemasaran, dan pengembangan produk agar mereka mampu bersaing lebih baik di pasar.
2. Penguatan Akses Pembiayaan: Perlu dilakukan langkah-langkah konkret

untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, termasuk memperluas jaringan lembaga keuangan mikro dan menengah serta menyediakan program kredit dengan bunga rendah atau tanpa agunan bagi UMKM.

3. Pembentukan Kemitraan dengan Sektor Swasta: Pemerintah perlu mendorong kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Ini dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses mereka terhadap teknologi dan sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Attride-Stirling, J. (2016). Qualitative research. *Innova Research Journal*, 1(2), 1–9.
- Aulia, N., Albaris, M. S., Nafisa, S. K., Agustina, D. R., & Nada, N. S. (2021). Studi pemulihan dan pengembangan ekonomi kreatif sub-sektor kuliner pasca pandemi (Covid-19) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Berajah Journal*, 2(1), 177–187.
- Cahyono, D. N., Putri, K., Afkarina, I., Aprilia, P., & Jember, S. (2023). Bangkitnya perekonomian Indonesia

- pasca Covid-19. *Jurnal*, 12(1), 59–75.
- Djoko, S. (2020). *Kewirausahaan: Sebuah konsep dasar pemahaman dan teknik pengembangannya*. Bandung: Media Nusa Creative.
- Fajar, N. D. M. (2015). *UMKM dan globalisasi ekonomi*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Putra, G. B. N. P., dkk. (2021). *Kewirausahaan*. Bandung: Nilacakra.
- Hernikawati, D. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Komunikasi Massa*, 3(1), 9–17.
- Imron. (2022). *Kota Palembang*.
- Janianda, M., Albaris, M. S., Nafisa, S. K., Agustina, D. R., & Nada, N. S. (2024). Peran usaha-usaha kecil di Palembang terhadap perekonomian nasional Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal*, 2(1), 118–132.
- Pramono, J. (2021). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Friadi, J., dkk. (2022). *Kewirausahaan berbasis produk*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Pintakami, L. B., dkk. (2023). Upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca Covid-19 melalui perijinan P-IRT di Kelurahan Dandong. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 33–38.
- Putranto, M. N. (2020). *Tinjauan operasional bagian general affair pada PT. Kamadjaja Logistics*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Purwadinata, S., & Batilmurik, R. W.
- Affrian, R. (2021). *Model-model formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semeseta Media.
- Siswoyo, B. (2021). *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 22(2).
- Suci, A. R. (2008). *Penguatan UMKM*. *Upp.Ac.Id*, 6(1), 1–31.
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Pemaparan tentang konsep. *Jurnal*, 5(3), 248–253.
- Syahruddin. (2018). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan studi kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Tarmizi, dkk. (2023). *Buku ajar kewirausahaan*. UPPM Universitas Malahayati.

